

Perempuan dalam Monopoli atas Kearifan Lokal

Sengaja Jurnal Perempuan kali ini mengangkat korelasi antara budaya atau tradisi dan keberadaan perempuan dalam masyarakat. Tema ini kita namakan kearifan lokal. Tema yang populer terutama sejak adanya kebijakan tentang otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia. Popularitas tema kearifan lokal ini kemudian terepresentasi dalam lahirnya peraturan-peraturan daerah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka berangkat dari falsafah lokal atau daerah. Alih-alih senang dengan desentralisasi yang dalam ekspektasi fase reformasi paska Orde Baru adalah perluasan tentang ide demokratisasi, yang terjadi adalah kearifan lokal yang simbolik, dan wujudnya menjadi kekerasan simbolik yang kemudian menjadi tindakan kekerasan yang fisik. Kearifan lokal yang terjadi menjadi diskriminatif, sama sekali tidak demokratis. Bila dihubungkan dengan kehidupan perempuan, simbol tentang kearifan lokal melalui peraturan daerah ini mengakibatkan perempuan terpenjara. Bagaimana ini bisa terjadi?

Tema kearifan lokal ternyata seperti pisau bermata dua, kearifan lokal bila ia mendominasi perempuan, maka ia menjadi kebudayaan yang menindas perempuan. Atau sebaliknya, bila kearifan lokal sebagai kebudayaan bukanlah sebagai alat untuk dominasi, maka kearifan lokal membebaskan kaum perempuan.

Ambilah contoh kearifan lokal yang menindas perempuan. Dalam tulisan Sudarto diungkapkan bagaimana falsafah Minangkabau tentang *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* menjadi katalisator untuk

menerapkan Minang sama dengan Islam, dan bukan orang Minang kalau dia tidak Islam. Islam di sini bukanlah sebuah kebenaran agama yang kita pikirkan, melainkan dimonopoli oleh model berpikir dan beragama yang teknis dan menggeser sejumlah isu penting masyarakat sesungguhnya seperti kemiskinan, korupsi, kebutuhan pangan, dll. Persoalan yang muncul dan menjadi keprihatinan kemudian adalah agama yang disucikan itu berubah menjadi monster karena perempuan dijadikan sebagai korban tema kearifan lokal ini, yaitu mengusung teks-teks keagamaan yang dapat ditafsirkan menjadi membenci perempuan. Tidak jarang perempuan yang ditangkap karena keluar malam sendirian, dianggap pelacur dan sebagainya. Selain itu atas nama Islam, sering dikeluarkan mengatur cara berpakaian perempuan.

Dalam tulisan Eko Bambang, soal busana yang dipakai perempuan menjadi sasaran utama pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan alasan perempuan sering mengundang maksiat dan karena itu perempuan yang pakaiannya tidak berjilbab haruslah dihukum. Tidak jarang di Aceh razia-razia tersebut menyasar pada perempuan-perempuan di jalan dan dengan cara yang anarkhis. M. Guntur Romli kemudian mengembalikan tafsir Islam itu sendiri dan Guntur berhasil menemukan bahwa peraturan daerah tersebut sebenarnya adalah kejahiliyahan atas nama Islam karena dampaknya malah melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Namun tidak semua kearifan lokal seperti yang telah diuraikan di atas, kita bisa menemukan kearifan-kearifan yang sebenarnya, seperti dalam tulisan Teddy A.N. Muhtadin tentang kearifan Sunda. Begitupula dengan profil Aleta Ba'un yang menjadikan kearifan lokal sebagai penolong kehidupan masyarakat, terutama masyarakat perempuan.

Jurnal Perempuan edisi kali ini juga membenteng wacana tentang adakah kebudayaan atau kearifan yang netral? Rocky Gerung menajamkan kembali melalui tulisannya, bahwa sejarah gerakan perempuan berseberangan dengan kearifan lokal. Karena hampir semua kebudayaan menekan atau menindas perempuan, termasuk agama yang sudah menjadi bagian dari kultur atau kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Namun bila dikaitkan dengan gerakan perempuan, kearifan lokal tidak dapat diabaikan. Seperti tulisan M. Zamiel El-Muttaqien tentang rekonsiliasi Madura dan Sambas, yang ternyata dapat membawa kearifan lokal sebagai kebudayaan perempuan dan karenanya perempuan dapat membawa perdamaian. (*Mariana Amiruddin*)